



LAPORAN LKJIP

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



20
24



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKj-IP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Implementasi LKj-IP ini pada dasarnya telah sesuai dengan pendekatan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah yang lebih memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola urusannya lebih baik dan bertanggungjawab.

Dalam Tahun 2023 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Kami berupaya secara optimal menyajikan LKj-IP secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan penyajian informasi dalam LKj-IP ini akan memberikan dorongan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak digunakan dalam mencari kelemahan penyelenggaraan pemerintah, tetapi untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LKj-IP ini dan khususnya kepada Tim penyusunan LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah atas kerja keras yang dilaksanakan selama ini.

Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Praya, 24 Januari 2025

KERALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah	1
I.2. Data	8
I.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	11
II.2. Rencana Kerja Tahunan	12
II.3. Indikator Kinerja Utama	13
II.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah	21
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah	23
III.4. Akuntabilitas Keuangan	24
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Golongan/Kepangkatan	8
Tabel I.2.	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel I.3.	Data Pegawai Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel I.4.	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Jabatan	9
Tabel II.1.	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026	11
Tabel II.2.	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	12
Tabel II.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	13
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	18
Tabel III.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2024	21
Tabel III.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2024	22
Tabel III.4.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Tahun 2024	23
Tabel III.5.	Tingkat Pencapaian Tujuan Srategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	23
Tabel III.6.	Anggaran dan Realisasi dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini merupakan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk mencapai kinerja utama daerah sesuai Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sudah memenuhi target sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan tahun 2023. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran Perangkat Daerah telah memenuhi target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan target nilai 2.55 (Cukup) terealisasi dengan nilai 3.04 (Baik) dengan mendapat predikat Berhasil;
2. Predikat Keterbukaan Informasi Publik, dengan target Informatif dapat terealisasi Menuju Informatif dengan predikat Tidak Berhasil;
3. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan predikat Berhasil;
4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan predikat Berhasil;
5. Nilai SAKIP OPD, dengan target predikat B terealisasi B dengan predikat Berhasil;
6. Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data, dengan target 58 instansi terealisasi 58 instansi, dengan predikat Berhasil;
7. Persentase informasi daerah yang diamankan, dengan target 100% terealisasi 100%, dengan predikat Berhasil;

Sementara itu capaian keuangan dari target Rp.7.797.169.597,00 terealisasi Rp.7.551.065.248,00 atau sebesar 96.84 % dengan predikat kinerja keuangan Tinggi.

Beberapa rekomendasi perbaikan kinerja kedepan diperlukan kolaborasi untuk penerapan integrasi aplikasi layanan pemerintahan dan publik, tata Kelola dan manajemen SPBE, penyelenggaraan audit dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, literasi digital dan pengembangan layanan Smart Village serta peningkatan kualitas data dan publikasi kinerja daerah.

LKj-IP ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Praya, 24 Januari 2025



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjalankan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I.2 Data

Jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 29 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel 1.1

No	Nama/NIP/NIPPPK	L/P	Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir	KET
1	Drs. H. MUHAMAD 196512311989031209	L	IV/c	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	S1	
2	SUNARNO, S. Sos, MM 197212291994021001	L	IV/a	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	S2	
3	LALU AGUS MAHYUDI, ST 197408172002121014	L	IV/a	Kabid Bidang APTIKA	S1	

4	H. ISWANDI KHAIRY RAMEN, S. IP, M. Han 198503222008031001	L	IV/a	Kabid Bidang PIKP	S2	
5	LALU ISHAK, S. Sos 197010121997031002	L	III/d	Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	S1	
6	JONI MILIAN HAKIM, S. IP 197206121994021004	L	III/d	Statistisi Ahli Muda	S1	
7	NINUK SILVIA, SE 197809242010012006	P	III/d	Perencana Ahli Muda	S1	
8	RAHMAWATI DIAN A, ST 198407122008032001	P	III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	
9	AKHDIYAT FAHRONY MAHSUN, ST, M.A.P.M 198503172009011003	L	III/d	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	S2	
10	MULIA ALI AKBAR, S. Pd 198509142009011004	L	III/d	Analisis Berita	S1	
11	NURMAH, S. Kom 198712252011012016	P	III/d	Analisis Sistem Informasi	S1	
12	SURATMAN ISKANDAR, S.T.P 197611232008011011	L	III/c	Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	S1	
13	BAIQ RUSTIATI 196812311992032081	P	III/b	Pengolah Daftar Gaji	SMA	
14	LALU MUHAMMAD NATSIR, A. Md 197508242009011003	L	III/b	Pengelola Data	D3	
15	ANJAR SISWARA, S.S.T 197707042005011011	L	III/b	Analisis Konten Media Sosial	S1	
16	RIJALUL KHAIRI, SE 197708072014071005	L	III/a	Pengadministrasi Kepegawaian	S1	
17	LALU AGUNG ABDUL AZIZ, S. Kom 198906172019031004	L	III/a	Pengelola Teknologi Informasi	S1	
18	RAHAYU AGUSTIANI, S. Si. 199008172022032001	P	III/a	Analisis Statistik	S1	
19	WAHYU SOFYANTI DEWI, S. Kom 199409102020122016	P	III/a	Analisis Sistem Informasi	S1	
20	HIKMAWATI, S. Mat. 199706302022032009	P	III/a	Analisis Statistik	S1	
21	LALU ABDUL MANAP, A. Ma 197809142009011003	L	II/d	Pranata Teknologi Informasi Komputer	D3	
22	FATHURROHMAN, A. Md 198504192019031002	L	II/d	Pengelola Sistem dan Jaringan	D3	
23	YUANITA ROHMAYANTI, A. Md 198506122019032006	P	II/d	Bendahara Pengeluaran	D3	
24	RIZKI EKA SETIA, A. Md 198905232020121006	L	II/c	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	D3	
25	BAIQ MIDARNI WATI, S. Kom 198209232024212003	P	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	
26	MUTIAH ARIFIN, S. Kom 198303052024212002	P	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	
27	BAIQ TUTI RUMLASARI, S. Kom 198604062024212003	P	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	
28	M. LUKMAN HAKIM, S. Kom 199601082024211001	L	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	
29	LALU HERY SUPRIADI, A. Md 198809012024211006	L	VII	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D3	

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan, 31 Desember 2024

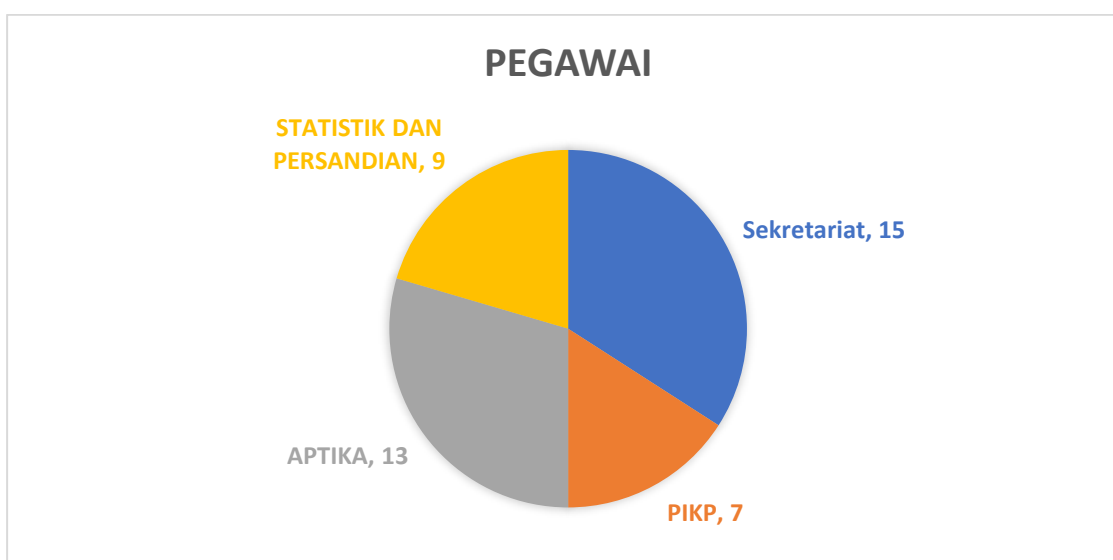
Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat Pendidikan, dan golongan per 31 Desember 2024 :

- a. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Jenis Kelamin**

Register Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024
Tabel 1.2

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	8	6
3	Bidang APTIKA	9	4
4	Bidang PIKP	6	1
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN	6	3
Jumlah		30	14

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

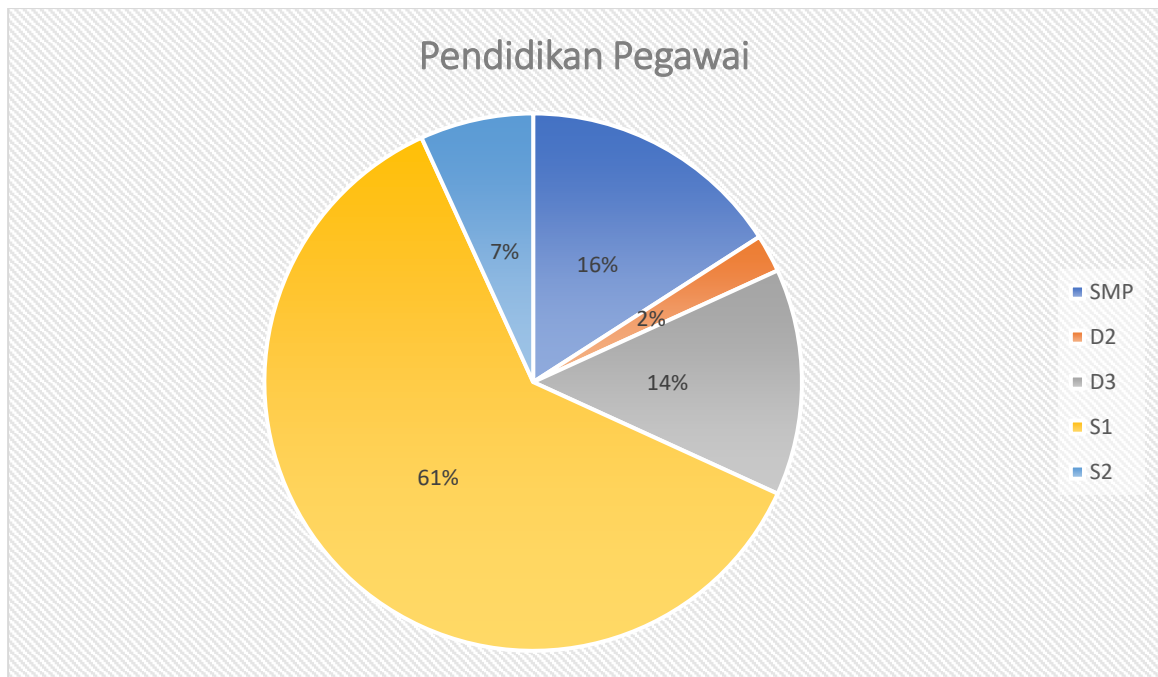


- b. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Jenis Pendidikan**

Tabel 1.2.3
Register Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SLTA	D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2
1	Kepala Dinas							1	
2	Sekretariat		4		1	4		4	1
3	Bidang APTIKA		2			1		10	
4	Bidang PIKP		1					5	1
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN					1		7	1
Jumlah			7		1	6		27	3

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

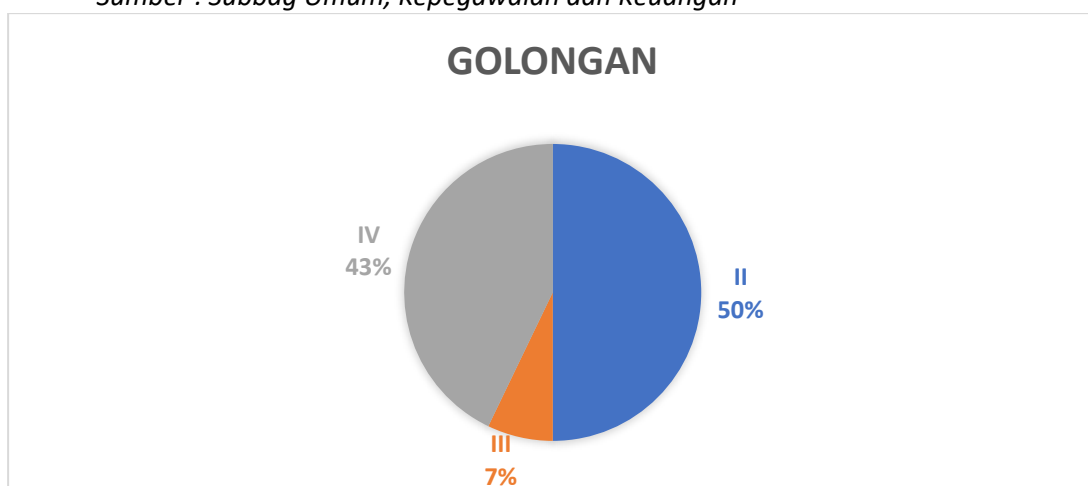


c. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Golongan**

Tabel 1.2.4
Register Pegawai berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan PNS			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas				1
2	Sekretariat		3	4	1
3	Bidang APTIKA		1	2	1
4	Bidang PIKP			2	1
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN			7	
Jumlah			4	15	4

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

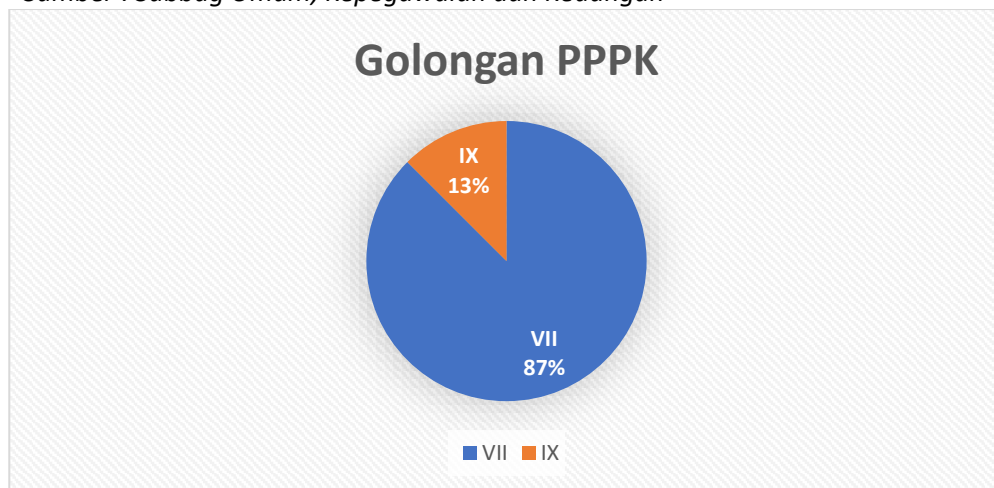


d. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Golongan (PPPK)**

Tabel 1.2.5
 Register Pegawai berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan PPPK			
		VII	VIII	IX	X
1	Kepala Dinas				
2	Sekretariat	1			
3	Bidang APTIKA			3	
4	Bidang PIKP			1	
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN				
Jumlah		1		4	

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan



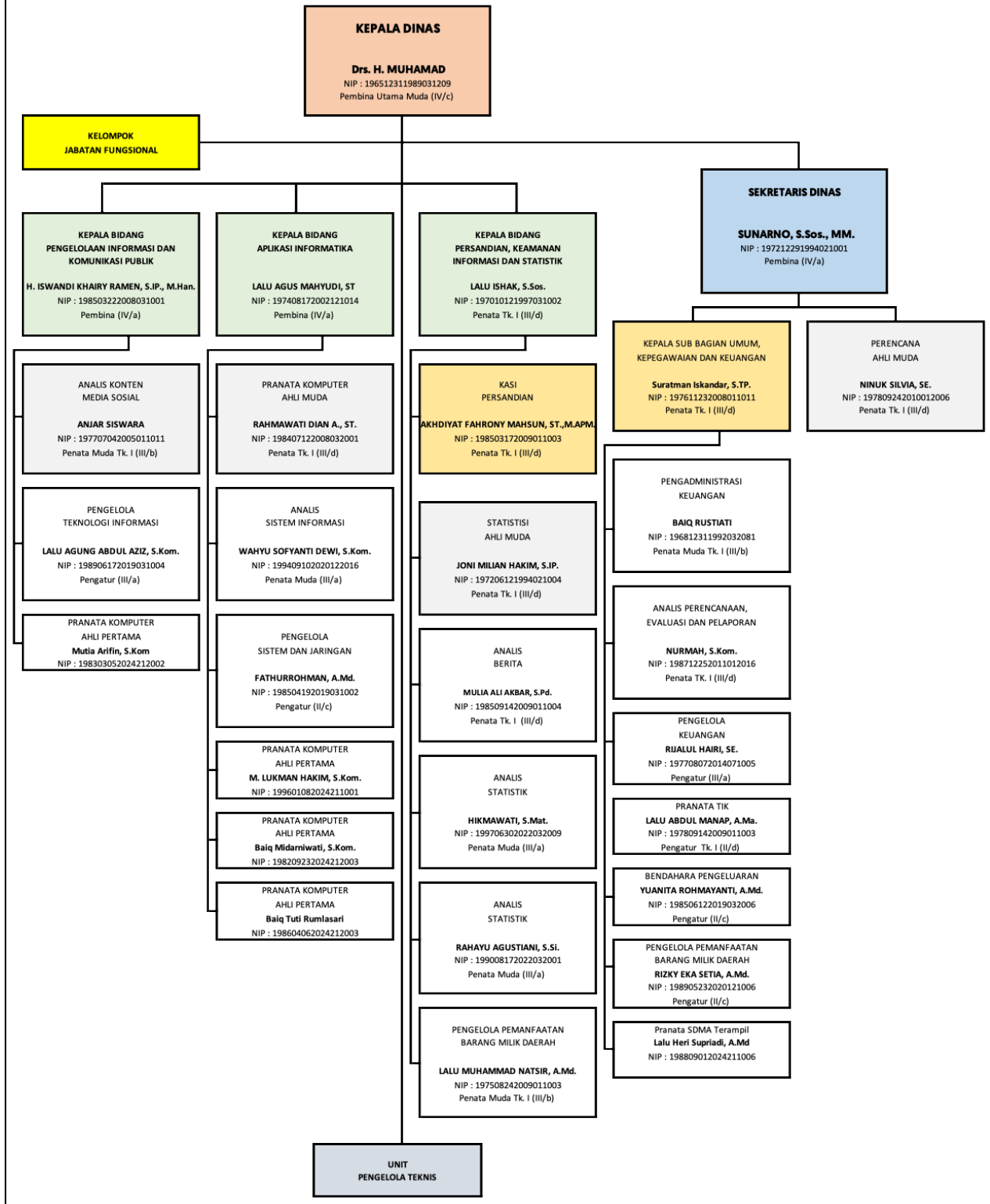
I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Staff
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 - a) Kabid PIKP
 - b) Staff
 2. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika, membawahi :
 - a) Kabid Aptika
 - b) Jabatan Fungsional
 - c) Staff
 3. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Persandian, membawahi:
 - a) Kabid Statistik dan Persandian
 - b) Kasi Persandian
 - c) Jabatan Fungsional
 - d) Staff

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas utama dalam perencanaan, pengembangan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung transparansi pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat sistem komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat. Dalam mendukung visi pembangunan daerah, Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah berfokus pada beberapa aspek strategis, antara lain:

1. Transformasi Digital

Mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor pemerintahan dan layanan publik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

2. Penguatan Infrastruktur TIK

Memastikan pemerataan akses internet dan jaringan komunikasi di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur digital.

3. Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik

Mengoptimalkan sistem keterbukaan informasi dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial, website resmi, dan layanan publik berbasis digital.

4. Keamanan dan Perlindungan Data

Menjaga keamanan data pemerintah serta mencegah ancaman siber yang dapat mengganggu sistem informasi dan komunikasi daerah.

Permasalahan Utama

Dalam menjalankan fungsinya, Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan internet yang memadai, sehingga menghambat pemerataan akses informasi dan layanan berbasis digital.

2. Literasi Digital yang Belum Merata

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi menghambat optimalisasi program digitalisasi yang telah dicanangkan pemerintah daerah.

3. Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Ancaman terhadap kebocoran data serta serangan siber menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi guna menjaga integritas informasi pemerintah daerah.

4. Koordinasi Antar OPD dan Stakeholder

Sinkronisasi kebijakan digital antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas penerapan program TIK.

5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat menuntut setiap daerah untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola serta mengamankan sistem informasi pemerintahan. Namun, hingga saat ini, keterbatasan tenaga ahli di bidang TIK dan keamanan informasi masih menjadi tantangan utama bagi banyak daerah, termasuk Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah jumlah tenaga profesional di bidang TIK yang masih belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan yang terus meningkat. Keberadaan tenaga ahli yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan

jaringan, sistem informasi, serta keamanan siber masih terbatas, sehingga menghambat optimalisasi penerapan teknologi digital di sektor pemerintahan dan layanan publik.

Dengan berbagai strategi yang telah dirancang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut agar dapat mewujudkan sistem komunikasi dan informasi yang lebih inklusif dan modern.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I.1 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Strategis disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta sebagai dokumen perencanaan program yang dapat memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan Bupati untuk mendukung visi dan misi Bupati.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu **Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)**. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dan sedangkan untuk MISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam Misi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ke 3 yaitu **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih**.

Oleh karna itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Kabupaten Lombok Tengah Dinak Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan Pelayanan Publik yang memuaskan**, tentunya hal itu dapat diwujudkan dengan adanya sasaran-sasaran yang harus tercapai, berikut rencana strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel II.1.
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 - 2026

Visi : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, BERMUTU, MAJU, DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Misi III : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.			
Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas	Nilai Domain Kebijakan SPBE	- Meningkatkan Efektifitas	- Peningkatan penerapan penyelenggaraan

Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peningkatan Sistem Layanan Informasi Publik - Penyusunan regulasi daerah beserta petunjuk teknis terkait pelaksanaan SPBE dan Smartcity - Meningkatkan pengelolaan informasi dan diseminasi informasi publik. - Peningkatan pemanfaatan layanan Sistem LAPOR. - Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan fungsi PPID Utama dan PPID OPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik - Peningkatan Keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik dari sisi perangkat keras maupun SDM - Peningkatan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik - Peningkatan pelayanan publik pemerintahan yang berbasis elektronik
	Nilai Domain Manajemen SPBE		
	Nilai Domain Layanan SPBE		
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	- Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah - Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	- Meningkatnya layanan Lombok Tengah Satu Data - Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Peningkatan efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah. - Peningkatan pengumpulan, pengolahan, Analisa dan desiminasi data statistik daerah
Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyusunan regulasi daerah terkait persandian dan keamanan informasi	Peningkatan SDM yang mengikuti pelatihan kompetensi bidang persandian dan pengamanan informasi

II.2 Rencana Kerja Tahunan

Berikut adalah rincian penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel II.2.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja (2024)
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	Nilai	2,55
		Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3,00
		Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,00
		Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,60
		Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	3,60
	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100

II.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel II.3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan	
					Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang	Meningkatnya kualitas layanan SPBE	Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE adalah ukuran kinerja dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup tata kelola, layanan, dan penerapan teknologi informasi di	Penghitungan nilai indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 : INDEKS SPBE = $\sum NDj \times BDj$ Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j - BDj = Bobot Domain ke-j	Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik dan

baik dan pelayanan Publik yang memuaskan				pemerintahan. Indeks ini dinilai berdasarkan komponen-komponen utama yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).	$\text{INDEKS DOMAIN} = \frac{1}{\text{BDi}} \sum \text{NAi} \times \text{BAi}$ Keterangan : - BDi = Bobot Domain ke-i - NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i - BAi = Bobot Aspek ke-i $\text{INDEKS ASPEK} = \frac{1}{\text{BAk}} \sum \text{Nik} \times \text{Bik}$ Keterangan : - BAk = Nilai Bobot Aspek ke-k - Nik = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k - Bik = Nilai Bobot indikator ke-k	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPd, Renstra).	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik sektoral untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk evaluasi dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
	Meningkatnya tata Kelola persandian dan keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi di lingkungan pemerintahan. Pengukuran ini mencakup audit keamanan, implementasi kebijakan keamanan informasi, dan manajemen risiko informasi	Jumlah Komponen Keamanan Informasi yang Memenuhi Standar dibagi Jumlah Total Komponen Keamanan Informasi yang dinilai di kali 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik

II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja menyajikan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran yang di sahkan.

Kinerja yang diukur tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Revisi terhadap perjanjian kinerja dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi nya pergantian atau mutasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
4. Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 seperti tabel di bawah ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. MUHAMAD**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP.**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 15 Januari 2024

Pihak Kedua

LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP.

Pihak Pertama

Drs. H. MUHAMAD
NIP.196512311989031209



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	2,55
2.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.733.330.829	DAU
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.749.999.463	DAU
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.629.427.478	DAU
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	68.079.600	DAU
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	111.865.828	DAU
TOTAL		7.292.703.198	

Praya, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,

LALU PATHUL BAHRI, S.IP., MAP.

Pihak Pertama,

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Dalam rangka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III.1.
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100 %	Sangat Baik
2	> 90 - 100 %	Baik
3	> 60 - 90 %	Cukup
4	> 40 - 60 %	Kurang
5	> 40 %	Sangat Kurang

Dalam mengukur capaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengukuran dengan metode membandingkan persentase realisasi capaian kinerja dengan target kinerja. Berikut formula pengukuran evaluasi kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel III.2.
Formula Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Sasaran Kinerja	Realisasi Sasaran Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2.55	-	$= (\text{Realisasi Sasaran Kinerja} / 2.55) * 100$
2	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan pembangunan daerah	100	-	$= (\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah} / \text{jumlah keseluruhan PD}) * 100$
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	-	$= (\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah} / \text{jumlah keseluruhan PD}) * 100$
3	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100	-	$= (\text{jumlah pengamanan informasi daerah} / \text{jumlah pengaman informasi daerah yang harus diamankan}) * 100$

III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan. Dalam mencapai tujuan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 3 Indikator Kinerja sasaran yaitu:

III.2.1 Sasaran 1 Index SPBE

Dalam upaya meningkatnya kualitas layanan SPBE, berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
 - Menyusun dan memperbarui kebijakan yang mendukung transformasi digital pemerintahan.
Dalam hal Menyusun dan memperbarui kebijakan yang mendukung transformasi digital pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah melakukan berbagai Upaya seperti menggunakan Indeks SPBE sebagai alat ukur efektivitas kebijakan digital, pemanfaatan secara maksimal digitalisasi layanan yang masih berbasis dokumen fisik agar lebih efisien dan transparan seperti pemanfaatan TTE dan Aplikasi SRIKANDI,
 - Memastikan standar layanan SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
 - Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam implementasi kebijakan SPBE.
2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi
 - Meningkatkan kapasitas dan keamanan jaringan infrastruktur untuk memastikan layanan digital berjalan lancar dengan menerapkan metode jaringan intra pemerintah.
3. Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data
 - Menerapkan keamanan siber yang kuat untuk melindungi data masyarakat dan pemerintahan dari ancaman peretasan dengan melakukan pentest (Penetration Testing) pada setiap aplikasi yang digunakan pemerintah daerah.
 - Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko.
4. Peningkatan Kapasitas SDM
 - Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai pemerintahan dalam bidang teknologi informasi (Pelatihan Audit TIK)
 - Mendorong budaya digital di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan SPBE.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
 - Menggunakan Indeks SPBE sebagai ukuran keberhasilan implementasi SPBE.
 - Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja layanan digital pemerintahan.

- Menyesuaikan layanan SPBE berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan kualitas layanan SPBE, pada tahun 2024 capaian target Indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mencapai predikat BAIK yaitu 3.04 dari target yang ditetapkan sebesar 2.55 atau 119,22% atau 112,59% dari target akhir Renstra sebesar 2,70

Berikut capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lombok Tengah “Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE” dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

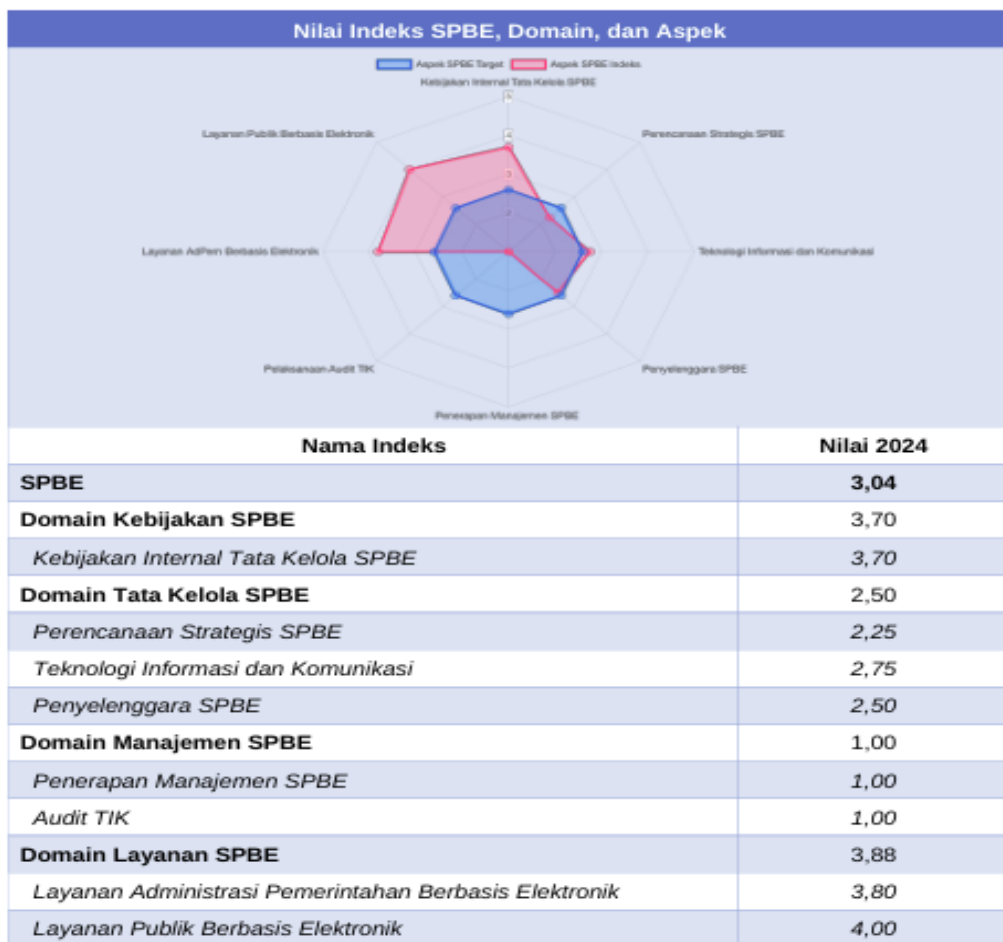
Tabel III.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	realiasi 2024	%	Target Tahun 2023	Target Akhir renstra	Sumber Data
1	Indeks SPBE	Nilai	2.55	3.04	119.22	2.69	2.7	Hasil Assesment Tim Penilai SPBE (https://tauval.go.id)

Hasil penilaian SPBE yang dikeluarkan Kementerian PANRB Republik Indonesia tahun 2024 untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah:

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH

3,04
(Baik)



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah:

Tabel III.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2021-2024 dengan target Renstra, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

No.	Tahun ke-N	Target Tahun ke-N	Nilai Indeks Tahun ke-N	Predikat	%	Target Akhir renstra	Rata-rata nilai SPBE kabupaten	Rata-rata nilai SPBE provinsi	Rata-rata nilai SPBE Nasional	Keterangan
1	2021	1.65	2.37	Cukup	143.64	3.13	2.11	2.46	2.24	Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 berada diatas rata-rata nilai kabupaten meskipun nilai harapan nasional adalah 2.60 (Nilai Indeks SPBE 2021)
2	2022	1.78	2.08	Cukup	116.85	3.13	2.17	2.74	2.35	Pada tahun 2022, nilai indeks SPBE kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk melihat perbandingan nilai spbe 2021 dengan 2022 dapat dilihat pada link berikut
3	2023	2.30	2.69	Baik	116.96	3.13	2.59	3.01	2.79	https://drive.google.com/file/d/1qymIFSSS6x2pRfyFda7SX10MORFUQfX/view?usp=sharing
4	2024	2.55	3.04	Baik	119.22	3.13	2.45	3.42	3.12	https://drive.google.com/file/d/1ypwozVPjtikTFxe_bEgIkrmzG6PZUKX2/view?usp=sharing

Sumber: <https://tauval.go.id>

III.2.2 Sasaran II Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan data statistic sectoral yang akurat dan terintegrasi, berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Dalam hal penguatan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan data statistic sectoral, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun Perbup Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Nomor 9 Tahun 2023 dan SK Bupati Nomor 226 Tahun 2024 tentang Pembentukan Penyelenggara Satu Data Kabupaten Lombok Tengah

2. Standarisasi dan Harmonisasi Data

Standarisasi dan harmonisasi data merupakan salah satu pengelolaan data untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan interoperabilitas antar instansi atau sektor. Untuk mewujudkan hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun Buku Pedoman Penyusunan Data Statistik Sektoral yang terbit pada bulan Mei tahun 2023.

3. Integrasi dan Interoperabilitas Data

Untuk mendukung strategi diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan aplikasi Satu Data Lombok Tengah yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia.

Dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pengelolaan data statistic sectoral yang akurat dan terintegrasi, pada tahun 2024 capaian target Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun dan Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lombok Tengah “Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2.2 Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	realiasi 2024	%	Target Tahun 2023	Target Akhir renstra	Sumber Data
1	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	%	100	100	100.00	100	100	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik

Perlu untuk diketahui, pada tahun 2024, telah dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Evaluasi ini dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistic sectoral. Berikut EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statisik sectoral pada instnasi pemerintah berikut dengan sajian predikat Indeks Pembangunan Statistik adalah:

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai nilai 2,80 dengan predikat BAIK. Berikut hasil evaluasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain (1)	Bobot (2)	Nilai Harapan (3)	Nilai Nasional (4)	Nilai Hasil Penilaian (5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	3,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	3,00
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,78
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,70
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,12
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,80

Sumber: Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-635/01000/ES/2024

Jika melihat tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Statistik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melebihi nilai harapan dan nilai di tingkat nasional sebesar 107,69% dan 115,15%.

Tabel III.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2021-2024 dengan target Renstra, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

No.	Tahun ke-N	Target Tahun ke-N	Nilai Indeks Tahun ke-N	Predikat	%	Target Akhir renstra	Rata-rata nilai SPBE kabupaten	Rata-rata nilai SPBE provinsi	Rata-rata nilai SPBE Nasional	Keterangan
1	2021	100%				100%				Tahun 2021-2023 masih menggunakan indikator sasaran "persentase PD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
2	2022	100%				100%				
3	2023	100%				100%				
4	2024	2.60	2.80	Baik	107.69		2.25	2.55	2.35	Indeks Penyelenggaraan Statistik (IPS) mulai diberlakukan pada tahun 2024 dengan harapan nilai sebesar 2.60. https://drive.google.com/file/d/1RjLhtgUSj8QMuj82af82w_rIA_s1zCid/view?usp=sharing

III.2.3 Sasaran III Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan tata Kelola persandian dan keamanan informasi, berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Dalam hal penguatan regulasi dan kebijakan terkait tata Kelola persandian dan kewanaman informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun SK Pembentukan Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber (CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM/CSIRT) yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Tengah Nomor 89 Tahun 2024. Selain itu juga telah digarap Perbup SMKI (Standar Manajemen Keamanan Informasi)

2. Peningkatan Infrastruktur Keamanan Informasi

Dari segi infrastruktur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah juga secara bertahap membangun miniSOC (Security Operation Center), penyediaan back up data, pembatasan akses fisik (ke server atau ruang data).

3. Kolaborasi dan Pertukaran Informasi

Dalam hal kolaborasi dan pertukaran informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan BSSN dengan telah buatkannya Surat Perjanjian Kerahasiaan dalam hal Sistem Monitoring Keamanan Siber Berupa Pemanfaatan Perangkat Sensor dan Perjanjian Kerjasama dengan BSSN tentang Pengelolaan Informasi Dini Serangan Siber Berupa Pemanfaatan Perangkat *Honeypot*, dan melakukan log dan audit keamanan informasi (pencatatan aktivitas system untuk deteksi aktivitas yang illegal).

4. Peningkatan Kapasitas SDM

Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam upaya meningkatkan tata kelola persandian dan kemandirian informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan melalui webinar mandiri.

5. Sosialisasi terkait Persandian dan Keamanan Informasi seperti penggunaan perangkat, kata sandi dan hak akses.

Dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan tata Kelola persandian dan kemandirian informasi, pada tahun 2024 capaian target Persentase tingkat kemandirian informasi Pemerintah Daerah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah “Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2.3 Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	realiasi 2024	%	Target Tahun 2023	Target Akhir renstra	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	%	100	100	100.00	100	100	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik

Tabel III.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2021-2024 dengan target Renstra, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

No.	Tahun ke-N	Target Tahun ke-N	Realisasi	Target Akhir renstra
1	2021	100%	100%	100%
2	2022	100%	100%	100%
3	2023	100%	100%	100%
4	2024	100%	100%	100%

III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Pencapaian Kinerja tujuan strategis yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat

pencapaian tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 di paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis

Table 3.3.1

Tujuan		Rata-Rata Capaian Sasaran		Kriteria Capaian Sasaran	Rata-Rata Capaian Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	Rata-rata Capaian Tujuan Tahun sebelumnya 2024	
1	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	1	Indeks SPBE	119%	Baik	119%	Baik	100%
		2	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	100%	Baik	100%	Baik	100%
		3	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	100%	Baik	100%	Baik	100%
Rata-rata Total				100%	Baik	100%	Baik	100%

Tabel 3.3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran/Strategis/ Sasaran Program	KINERJA				KEUANGAN				
		Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja	%	Program	Target	Realisasi Keuangan	%
	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Indeks SPBE	2,55	3,04	119,22	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.629.427.478	1.603.944.673	98,44
			Nilai Domain Kebijakan SPBE	3	3,70	123,33				
			Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2	2,50	125,00				
			Nilai Domain Manajemen SPBE	1,6	1,00	62,50				
			Nilai Domain Layanan SPBE	3,6	3,88	107,78	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.101.084.503	2.089.792.900	99,46
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	67.882.698	67.160.000	98,94
			Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%				
Meningkatnya tata kelola persandian dan keamanan informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	111.865.828	107.096.020	95,74	

III.3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

III.3.1.1. Penyebab Keberhasilan Dalam Pencapaian Sasaran Kinerja

Berdasarkan tabel 3.3.2 di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai persentase rata-rata sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja yang maksimal seperti:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Dalam hal penguatan kebijakan dan regulasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tengah menerapkan:

a. Sasaran 1: Indeks SPBE

[Peraturan Bupati Nomor 6A Tahun 2024](#) sebagai dasar hukum pengaturan penerapan serta norma arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, serta audit TIK di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah. Peraturan Bupati tersebut telah mencakup seluruh ruang lingkup sesuai dengan referensi penyelenggaraan SPBE dan telah melalui proses reuiu.

b. Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akur dan Terintegrasi

- [Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023](#) tentang Satu Data Lombok Tengah sebagai dasar hukum pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Satu Data Lombok Tengah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Daerah yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan berbagi pakai yang dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
- [SK Bupati Nomor 226 Tahun 2024](#) tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Tingkat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan (5), dan Pasal 24 ayat (5).

c. Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Diterbitkannya SK Bupati Lombok Tengah Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber (CYBER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM/CSIRT).

2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Dari segi pengembangan infrastruktur teknologi, Dinas Komunikasi telah melaksanakan berbagai inovasi diantaranya:

a. Sasaran 1: Indeks SPBE

Dalam meningkatkan kualitas layanan SPBE dalam hal pengembangan infrastruktur teknologi, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerapkan metode jaringan intra pemerintah, metode ini bertujuan untuk memusatkan penggunaan jaringan seluruh perangkat daerah.

b. Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Terintegrasi

Dalam meningkatkan pengelolaan data statistic sektoral yang akurat dan terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan aplikasi Satu Data Lombok Tengah yang telah terintegrasi dengan Satu Data Indonesia.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Dalam meningkatkan tata kelola persandian dan kemanan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 secara bertahap telah membangun ruangan MiniSOC (Mini Security Operation Center) dengan telah menyediakan server.

3. Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data

Peningkatan keamanan dan perlindungan data merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan tata kelola persandian dan keamanan informasi. salah satu Upaya yang dilakukan adalah dengan adanya [Surat Pernyataan Perjanjian Kerahasiaan \(Non Disclosure Agreement\) Nomor 711/131/Diskominfo/2024](#) dalam hal Sistem Monitoring Keamanan Siber (SMKS) Berupa Pemanfaatan Perangkat Sensor antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dengan Direktorat Operasi Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM juga telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu cara untuk mencapai sasaran kinerja, diantara dengan mengikuti Pelatihan Audit TIK (link [Sertipikat](#)), dan pelatihan Keamanan Siber (link [Sertipikat](#))

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

6. Sosialisasi dan Pelatihan

7. Kolaborasi

Dalam hal kolaborasi, pada tahun 2024 telah diluncurkan Layanan Telpon Darurat “Call Center 112” dimana dalam layanan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berkolaborasi dengan BPBD, Dinas DAMKARTAN, Dinas Kesehatan, RSUD Praya, SatPOL PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Polres Lombok Tengah, PLN Praya.

III.3.1.1. Kendala-kendala dan rekomendasi (Alternative Solution) Dalam

Pencapaian Sasaran Kinerja

Meskipun capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mencapai 100%, namun secara kualitas, pencapaian tersebut masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan. Hal ini sesuai dengan laporan hasil evaluasi dari Kementerian seperti:

1. Indeks SPBE

Pada tahun 2024, capaian kinerja untuk sasaran 1: Indeks SPBE mencapai 3.04 dari target 2.55 atau 119,22%. Meski capaian tersebut melebihi target, di dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, pencapaian indeks tersebut masih memiliki beberapa **kelemahan** yaitu:

- a. Perencanaan Strategis Peta Rencana SPBE masih belum terlaksana secara maksimal.
- b. Peta Rencana SPBE masih belum disusun
- c. Jaringan layanan intra pemerintah masih belum mengcover seluruh Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan kegiatan koordinasi tim SPBE masih belum berjalan sesuai perencanaan

- e. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih belum menerapkan manajemen pengetahuan, manajemen layanan SPBE, dan Kompetensi SDM secara maksimal.

Kendala:

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM yang memahami tata kelola SPBE.
- b. Belum semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan SPBE.
- c. Jaringan internet di beberapa wilayah belum mendukung implementasi layanan berbasis digital
- d. Kurangnya integrasi sistem dan interoperabilitas antar-aplikasi yang digunakan oleh OPD
- e. Beberapa pegawai dan masyarakat masih belum terbiasa dengan layanan digital pemerintahan.

Rekomendasi atau tindak lanjut:

- a. Penekanan pada pemahaman dan komitmen semua pemangku kebijakan atau kepentingan
- b. Untuk setiap perangkat daerah yang akan mengembangkan atau membangun sebuah aplikasi harus melalui rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- c. Peningkatan dan perluasan infrastruktur layanan jaringan intra pemerintah
- d. Mendorong untuk digencarkannya kegiatan bimtek dan pelatihan kompetensi terkait tata kelola SPBE.

2. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Terintegrasi

Pada tahun 2024, capaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Terintegrasi mencapai 100%. Meski demikian, ada beberapa **kelemahan** yang masih terlihat yaitu:

- a. Tingkat kualitas data masih lemah.
- b. Dalam hal perencanaan data terkait proses penyiapan instrument data masih kurang.

Kendala:

- a. SDM yang memadai dan kapabel masih kurang dan masih pada tingkat pelaksana.

- b. Tingkat pelaksanaan kegiatan statistik masih belum dilakukan oleh seluruh produsen data

Rekomendasi dan tindak lanjut:

- a. Perlu melakukan evaluasi dan perbaikan pada aspek standar data, interoperabilitas data, akurasi data, aksesibilitas data, keterbandingan dan konsistensi data.
- b. Perlu melakukan pengembangan terkait profesionalitas dan pengorganisasian statistik
- c. Menyusun Kembali analisis kebutuhan dan strategi pemenuhan kebutuhan SDM Statistik dan manajemen data yang memadai dan kapabel.

3. Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Pada tahun 2024, capaian sasaran kinerja meningkatnya tata kelola persandian dan keamanan informasi mencapai 100%.

Kendala-kendala:

- a. Kapabilitas SDM yang masih kurang
- b. Infrastruktur pendukung pengamanan informasi yang masih kurang
- c. Kebijakan atau regulasi tentang keamanan informasi belum ada
- d. Dukungan dana masih minim
- e. Kurangnya sosialisasi terkait keamanan informasi

Kelemahan:

- a. Penanganan keamanan informasi masih belum maksimal.
- b. Kesadaran tentang keamanan informasi masih sangat rendah.
- c. Lemahnya tingkat keamanan pada aplikasi-aplikasi yang dikembangkan
- d. Regulasi dan kebijakan yang mengatur keamanan informasi masih lemah.
- e. Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan karena dukungan dana yang masih kurang

Rekomendasi atau tindak lanjut:

- a. Penyusunan analisis kebutuhan SDM penunjang kegiatan persandian dan keamanan informasi
- b. Investasi pada infrastruktur pengamanan informasi
- c. Sosialisasi terkait pentingnya keamanan informasi yang lebih efektif.
- d. Menyusun regulasi dan kebijakan terkait keamanan informasi

III.3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 sebesar Rp. 2.280.833.029,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.264.048.920,00 atau sebesar 99,26%. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dianalisis dengan membandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja. Jika melihat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,26%, hal ini menunjukkan bahwa dengan biaya yang lebih rendah dari yang dialokasikan, capaian mampu mencapai target bahkan lebih.

Efisiensi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat anggaran yang tidak terealisasi bersumber dari honorarium PPK merangkap Pengguna Anggaran yang tidak diperbolehkan menerima honorarium sesuai kebijakan daerah
2. Anggaran SPPD sudah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan di tahun 2024 sehingga masih ada anggaran tersisa
3. Anggaran BBM untuk pejabat fungsional sudah tidak boleh dibayarkan lagi karena mereka sudah mendapatkan tunjangan fungsional sendiri.
4. Ada salah satu media yang tidak mengajukan invoice ppembayaran.
5. Ada kegiatan Konferensi pers yang tidak membutuhkan biaya konsumsi dikarenakan kegiatannya hanya sebentar.
6. Tidak semua fitur atau layanan yang awalnya direncanakan jadi digunakan, sehingga pemilihan paket yang lebih rendah dari anggaran awal menghasilkan penghematan.
7. Penyedia jasa yang dipilih memberikan penawaran harga yang lebih rendah dari perkiraan anggaran awal tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
8. Sisa uang sppd tidak mencukupi untuk melaksanakan undangan bimtek sehingga tidak dipergunakan, hal ini dikarenakan untuk pengajuan uang SPPDnya dengan tujuan Jakarta sedangkan kegiatan Bimteknya dilakukan di Makasar sehingga uang SPPD tidak mencukupi.

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Berikut adalah pencapaian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.6.
Anggaran dan Realisasi dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung				Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase	Unit Kerja yang melaksanakan program/kegiatan
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Operasi	Belanja Modal				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.416.595			24.416.595		24.416.595	24.103.500	97,99	Sekretariat
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.097.189.992			3.097.189.992		3.097.189.992	2.942.928.329	95,06	Sekretariat
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.577.193			299.768.117	35.809.075	335.577.193	309.271.796	92,16	Sekretariat
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.075.730			26.075.730		26.075.730	26.035.000	99,84	Sekretariat
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.173.060			312.432.495	11.740.565	324.173.060	309.513.000	95,48	Sekretariat
6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.476.520			79.476.520		79.476.520	69.870.030	87,91	Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.101.084.503			1.840.173.850	260.910.653	2.101.084.503	2.101.084.503	99,46	Bidang PIKP
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.629.427.478			1.429.379.243	200.048.235	1.629.427.478	1.603.944.673	98,44	Bidang APTIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.882.698			67.882.698		67.882.698	67.160.000	98,94	Bidang Statistik dan Sandi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	111.865.828			41.865.828	70.000.000	111.865.828	107.096.020	95,74	Bidang Statistik dan Sandi

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Sepanjang tahun 2024, Dinas Kominfo telah menunjukkan peningkatan kinerja di sejumlah aspek, seperti pengembangan aplikasi layanan publik, peningkatan nilai indeks SPBE, serta penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Namun, hasil evaluasi internal juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun berikutnya.

Kelemahan:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis
Masih terdapat kekurangan tenaga teknis bersertifikasi, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi, keamanan siber, dan integrasi aplikasi layanan digital.
2. Koordinasi Lintas OPD yang Belum Optimal
Belum semua perangkat daerah terlibat aktif dalam integrasi layanan digital maupun dalam pengelolaan data sektoral, sehingga implementasi SPBE masih bersifat parsial.
3. Minimnya Inovasi Berbasis TIK di Tingkat Unit Kerja
Sebagian unit kerja belum secara aktif mengembangkan atau memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi layanan publik.
4. Pemanfaatan Data Statistik Masih Terbatas pada Fungsi Administratif
Penggunaan data statistik sektoral belum sepenuhnya mendukung perencanaan berbasis data dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Saran dan Rekomendasi:

1. Penguatan Kapasitas SDM
Perlu dilakukan pelatihan teknis dan sertifikasi di bidang jaringan, keamanan informasi, dan manajemen data untuk pegawai yang membidangi TIK dan persandian.
2. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
Diperlukan penguatan infrastruktur dan interoperabilitas aplikasi untuk mendorong satu data dan satu layanan pemerintahan digital.

3. Penyusunan SOP dan Roadmap SPBE

Menyusun standar operasional prosedur dan roadmap implementasi SPBE lintas sektor agar terarah dan sistematis.

4. Peningkatan Inovasi Pelayanan Digital

Mendorong unit kerja untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Sektor

Mendorong kolaborasi antar-OPD dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan berbasis data.

Dinas Kominfo berkomitmen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Praya, 24 Januari 2025

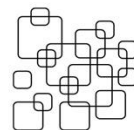
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209



LAMPIRAN

- ❖ **CASCADING & POHON KINERJA**
- ❖ **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- ❖ **RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**
- ❖ **PRESTASI/PENGHARGAAN DISKOMINFO
TAHUN 2024**
- ❖ **MATRIKS HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
PERENCANAAN DISKOMINFO TAHUN 2024**



CASCADING DISKOMINFO KAB. LOMBOK TENGAH

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 - 2025



VISI	Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERKUALITAS, SEHAT, BERKEMAJUAN, MADU dan BERBUDAYA BERKAITU JAKA						
MISI	Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mutakhir, Cepat dan Berkah						
Sasaran (Kategori I)	Mewujudkan Pelayanan SPE yang Prima serta Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPE yang Optimal						
Tujuan (Kategori II)	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan Pelayanan Publik yang memuaskan						
Indikator Tujuan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Indeks SPE	Nilai	Indeks SPE mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPE merupakan nilai kumulatif dari pembobotan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain	1,78	2,3	2,55	2,7	3,23

Sasaran (Kategori II) : Meningkatkan Kualitas Layanan SPE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)							
Indikator Sasaran	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Nilai Domain Kebijakan SPE	Nilai	Nilai Indeks Domain (NI) kali Bobot Domain (BD%)	2,00	2,70	3,00	3,10	3,50
Nilai Domain Tata Kelola SPE	Nilai	Nilai Indeks Domain (NI) kali Bobot Domain (BD%)	1,70	1,90	2,00	2,10	2,50
Nilai Domain Manajemen SPE	Nilai	Nilai Indeks Domain (NI) kali Bobot Domain (BD%)	1,00	1,30	1,60	1,90	2,30
Nilai Domain Layanan SPE	Nilai	Nilai Indeks Domain (NI) kali Bobot Domain (BD%)	2,00	3,50	3,60	3,80	4,00

Sasaran (Kategori II) : Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektor Yang Akurat dan Terintegrasi							
Indikator Sasaran	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi semua PD dikalikan 100	100	100	100	100	100
Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi semua PD dikalikan 100	100	100	100	100	100

Sasaran (Kategori II) : Meningkatkan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi							
Indikator Sasaran	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Presentase tingkat keamanan informasi pemerintahan	%	Jumlah Pengamanan Informasi Daerah / Jumlah Pengamanan Informasi yang harus dilakukan dikalikan 100%	100	100	100	100	100

Program 1 (Kategori III) : Seleksi dan Diklat							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Nilai SAKIP DPD	Produk	Nilai SAKIP	8	8	8	8	8

Program 2 (Kategori III) : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Presentase OPD yang menggunakan E-Gov dalam penyelenggaraan kegiatan	%	Jumlah OPD yang menggunakan E-Gov dalam penyelenggaraan kegiatan dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100	78,18	83,63	89,08	94,53	100,00

Program 3 (Kategori III) : Keadilan Aplikasi dan Informatika							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Presentase OPD yang menyalurkan pelayanan publik secara online	%	Jumlah OPD yang menyalurkan pelayanan publik secara online dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100	90,00	85,00	90,00	95,00	100,00

Program 4 (Kategori III) : Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Jumlah instansi yang melaksanakan layanan persandian	Instansi	Jumlah instansi dengan layanan Lombok Tengah Satu Data	5800	5800	5800	5800	5800

Program 5 (Kategori III) : Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Presentase informasi daerah yang diminta dibagi jumlah seluruh informasi daerah yang harus disampaikan dikali 100	%	Jumlah informasi daerah yang diminta dibagi jumlah seluruh informasi daerah yang harus disampaikan dikali 100	100	100	100	100	100

Kategori IV : Keunggulan Umum, Keagamaan dan Keunggulan							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Presentase HKU OPD yang Tercepat	%	Capaian HKU dibagi dengan target HKU dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 2: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Presentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	%	Jumlah temuan hasil pemeriksaan keuangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 3: Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Presentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	%	Jumlah penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dibagi dengan jumlah pekerjaan yang memiliki SOP dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 4: Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Perunggian Urusan Pemerintahan Daerah							
Presentase Validasi Data Aspek OPD	%	Jumlah data yang validasi dibagi dengan jumlah data awal dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 5: Kegiatan Penyelenggaraan Perunggian Urusan Pemerintahan Daerah							
Presentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan Tepat Waktu	%	Jumlah pekerjaan sesuai SOP yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah pekerjaan yang memiliki SOP dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 6: Kegiatan Pemantauan Barung Milik Daerah Perunggian Urusan Pemerintahan Daerah							
Presentase BMD Kondisi Baik	%	Jumlah BMD dengan kondisi baik dibagi dengan jumlah BMD dikalikan 100	100	100	100	100	100

Kategori III: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Jumlah PPO (DPA, Desa, Sekeloa, Puskominfo) yang aktif melaksanakan pelayanan informasi	PPO	Jumlah PPO yang aktif melaksanakan pelayanan informasi	91	101	125	133	183

Kategori III: Keadilan Aplikasi dan Informatika							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi	Aplikasi	Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi	2	1	1	1	1

Kategori III: Keadilan Aplikasi dan Informatika							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
1. Buku Saku Statistik	Dokumen	Jumlah Jenis Buku Yang di Diklat	3	3	3	3	3
2. Buku Lombok Tengah Dalam Data							
3. Buku Kecepatan Dalam Data							

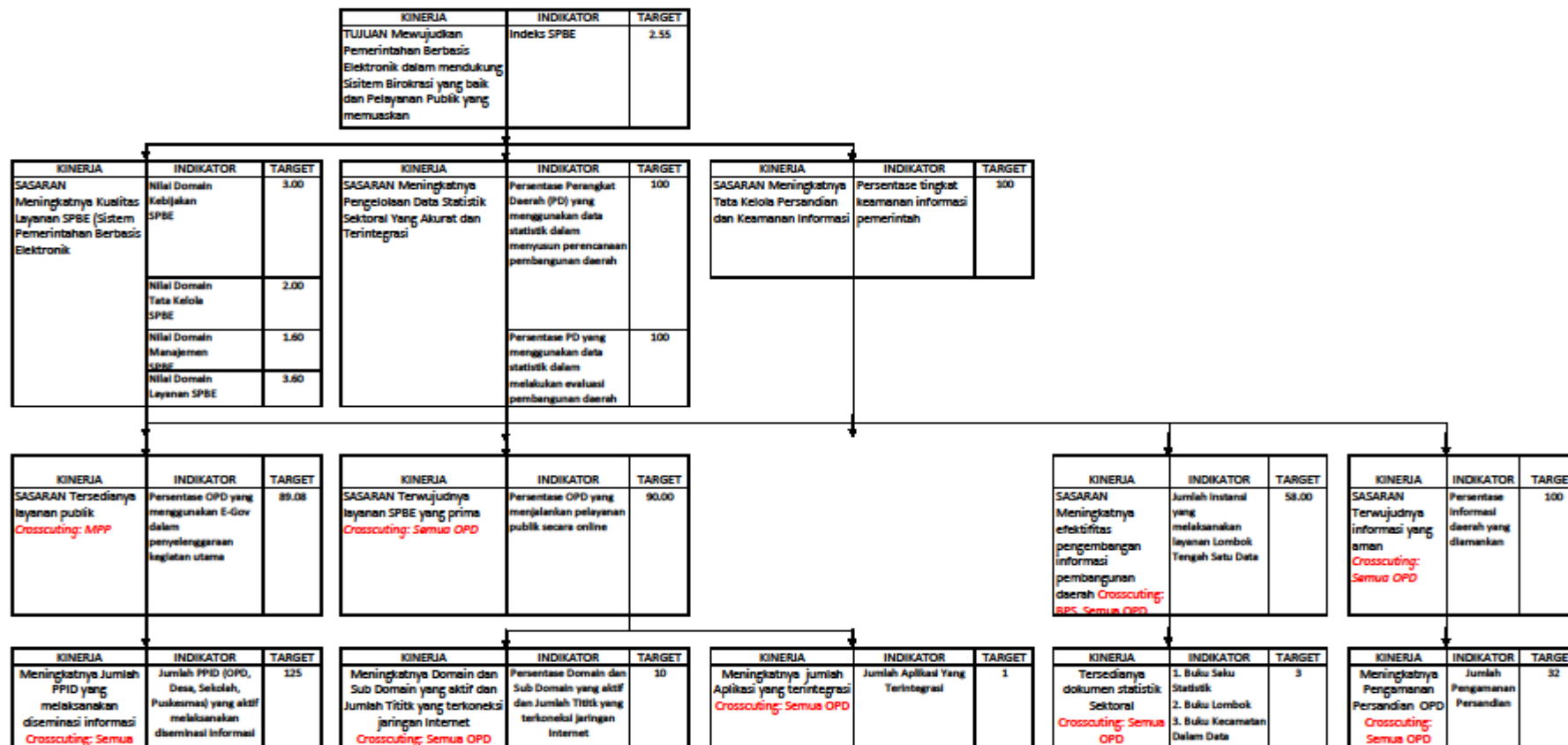
Kategori IV: Kapasitas Persandian							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Jumlah Pengamanan Persandian pada OPD	OPD	Jumlah Pengamanan Persandian pada OPD	32	32	32	32	32

Proy. 24 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. Muhsin
Pemrina Utama Muda (P/1)
NIP. 19651231198031209

POHON KINERJA DISKOMINFO KAB. LOMBOK TENGAH

POHON KINERJA (LOGIC MODEL)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024



Prasa, 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. P. Widiyamad
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 196512311989031209

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LOMBOK TENGAH

Tahun

2025

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan		TARGET					
					Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Meningkatnya kualitas layanan SPBE	Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE adalah ukuran kinerja dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup tata kelola, layanan, dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. Indeks ini dinilai berdasarkan komponen-komponen utama yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).	<p>Penghitungan nilai indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 :</p> <p>INDEKS SPBE = $\sum NDj \times BDj$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j - BDj = Bobot Domain ke-j $\text{INDEKS DOMAIN} = \frac{1}{BDi} \sum NAI \times BAI$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BDi = Bobot Domain ke-i - NAI = Nilai Indeks Aspek ke-i - BAI = Bobot Aspek ke-i $\text{INDEKS ASPEK} = \frac{1}{BAk} \sum NIK \times BIK$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAK = Nilai Bobot Aspek ke-k - NIK = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k - BIK = Nilai Bobot indikator ke-k 	Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,65	1,78	2,30	2,55	2,70	3,13
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra).	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100	100
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik sektoral untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk evaluasi dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya tata Kelola persandian dan keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam melindungi kerahasiaan,	Jumlah Komponen Keamanan Informasi yang Memenuhi Standar dibagi Jumlah Total Komponen Keamanan Informasi yang dinilai di kali 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100

				integritas, dan ketersediaan informasi di lingkungan pemerintahan. Pengukuran ini mencakup audit keamanan, implementasi kebijakan keamanan informasi, dan manajemen risiko informasi									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berikut adalah penjelasan untuk tabel indikator kinerja yang disusun berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound):

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Waktu	Keterangan
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks SPBE	Nilai	2021-2026	Mengacu pada Indeks SPBE Nasional
Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik	Meningkatkan persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	Persentase (%)	2021-2026	Mengacu pada jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik
Meningkatkan Tata Kelola Keamanan Informasi	Meningkatkan tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase komponen keamanan informasi yang memenuhi standar	Persentase (%)	2021-2026	Mengacu pada audit keamanan informasi yang dilakukan

1. Tujuan:

- Menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam tabel ini, tujuan mencakup:
 - Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
 - Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral.
 - Meningkatkan tata kelola keamanan informasi.

2. Sasaran Strategis:

- Sasaran spesifik yang mendukung pencapaian tujuan. Setiap sasaran strategis terfokus pada hal yang lebih terukur, misalnya:
 - Meningkatkan kualitas layanan SPBE untuk tujuan pemerintahan berbasis elektronik.
 - Meningkatkan perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
 - Meningkatkan keamanan informasi untuk melindungi data pemerintahan.

3. Indikator Kinerja:

- Menyatakan ukuran keberhasilan yang spesifik dan terukur. Contohnya:
 - Nilai Indeks SPBE, yang mengukur kualitas implementasi SPBE.
 - Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sebagai ukuran tingkat adopsi data dalam perencanaan.
 - Persentase komponen keamanan informasi yang memenuhi standar, yang menunjukkan tingkat keamanan informasi pemerintahan.

4. Satuan:

- Unit yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja. Dalam hal ini, ada dua jenis satuan: nilai (untuk indeks SPBE) dan persentase (untuk indikator lainnya).

5. Target Waktu:

- Memberikan batas waktu pencapaian sasaran yang realistis dan relevan. Semua target diarahkan untuk dicapai selama periode 2021-2026.

6. Keterangan:

- Memberikan konteks tambahan tentang bagaimana indikator diukur atau dipahami. Penjelasan ini membantu dalam memastikan indikator tersebut relevan dengan tujuan organisasi:
 - Indeks SPBE diukur berdasarkan standar nasional.
 - Persentase perangkat daerah dihitung dari jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik.
 - Persentase keamanan informasi dinilai melalui audit dan penerapan standar keamanan informasi.

Prinsip SMART dalam Tabel Ini :

- **Specific (Spesifik):** Indikator dan sasaran sangat spesifik, misalnya "Nilai Indeks SPBE" atau "Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik."
- **Measurable (Terukur):** Setiap indikator memiliki satuan dan metode pengukuran yang jelas, seperti nilai atau persentase.
- **Achievable (Dapat Dicapai):** Target yang ditetapkan (misalnya, untuk 2021-2026) disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan organisasi.
- **Relevant (Relevan):** Indikator langsung berkaitan dengan tujuan strategis organisasi, seperti meningkatkan tata kelola data dan keamanan informasi.
- **Time-bound (Berbatas Waktu):** Target waktu pencapaian telah ditentukan dengan jelas (2021-2026).

Demikian, tabel ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan kinerja organisasi secara berkala.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KAB. LOMBOK TENGAH,



Drs. H. MUHAMAD

196512311989031209

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	Nilai	2,55
	Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3,00
	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,00
	Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,60
	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	3,60
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100



Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Lombok Tengah

Drs. H. Muhamad

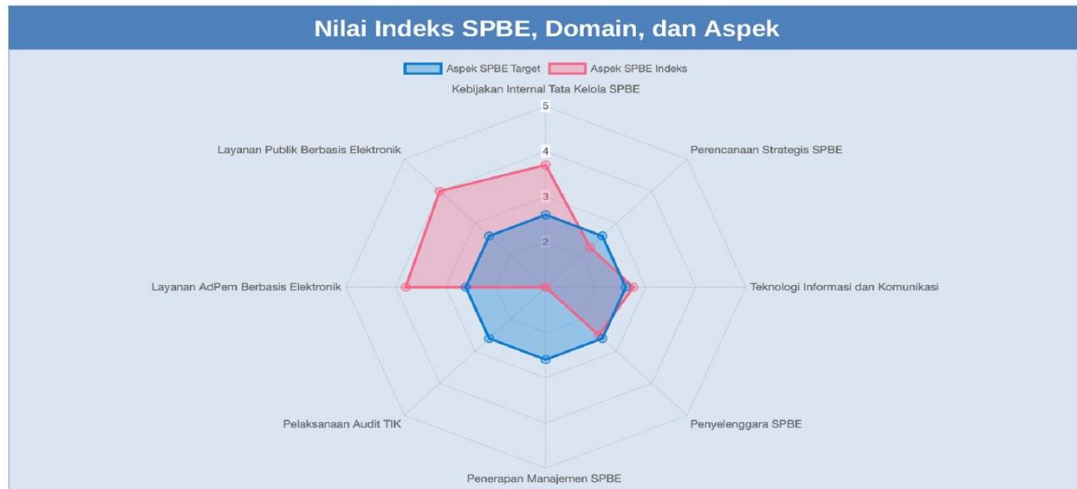
NIP. 19651231 198903 1 209

PRESTASI/PENGHARGAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

1. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meraih indeks SPBE dengan Predikat BAIK dan menempati urutan ke-5 di NTB

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH	3,04 (Baik)
--	-----------------------



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,04
Domain Kebijakan SPBE	3,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,70
Domain Tata Kelola SPBE	2,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,88
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,00

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,56	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	3,05	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	3,27	Baik
5	Pemerintah Kab. Bima	2,52	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,90	Baik
7	Pemerintah Kab. Dompu	2,52	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	3,45	Baik
9	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,71	Baik
10	Pemerintah Kota Mataram	3,55	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bima	2,66	Baik

Dalam laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih **indeks 3,04** dengan predikat **Baik**. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kabupaten Lombok Tengah dalam mengimplementasikan SPBE sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

Posisi dan Perbandingan

Kabupaten Lombok Tengah menempati **peringkat kelima** dari 11 pemerintah daerah yang dievaluasi di NTB. Berikut adalah peringkat dan indeks terkait:

1. **Pemerintah Provinsi NTB:** Indeks 3,56, predikat **Sangat Baik**.
2. **Pemerintah Kota Mataram:** Indeks 3,55, predikat **Sangat Baik**.
3. **Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat:** Indeks 3,45, predikat **Baik**.
4. **Pemerintah Kabupaten Lombok Barat:** Indeks 3,05, predikat **Baik**.
5. **Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah:** Indeks 3,04, predikat **Baik**.

Kabupaten Lombok Tengah berhasil mengungguli beberapa daerah lain seperti Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan lainnya, meskipun masih berada di bawah Kabupaten Lombok Barat dan beberapa daerah lainnya dalam hal implementasi SPBE.

Analisis dan Peluang

Dengan predikat **Baik**, Lombok Tengah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital. Namun, untuk meningkatkan peringkatnya, beberapa langkah berikut dapat diprioritaskan:

1. **Penguatan Integrasi Sistem Informasi:** Memastikan keterpaduan data lintas OPD dan meminimalkan silo data.
2. **Pengembangan Infrastruktur Digital:** Memperluas jaringan internet hingga ke wilayah pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik berbasis elektronik.
3. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Fokus pada aplikasi layanan publik yang user-friendly dan mudah diakses masyarakat.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan indeks SPBE dan predikat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat:

1. **Menambah Inovasi Digital:** Menerapkan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) atau blockchain untuk mendukung layanan administrasi dan pengelolaan data.
2. **Pelatihan Berkelanjutan untuk ASN:** Mengadakan pelatihan intensif tentang transformasi digital dan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.
3. **Kolaborasi Regional:** Bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki indeks lebih tinggi untuk berbagi praktik terbaik.

Kesimpulan

Capaian indeks SPBE sebesar **3,04** dengan predikat **Baik** mencerminkan progres positif digitalisasi di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan peningkatan fokus pada integrasi sistem, infrastruktur digital, dan layanan publik, Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi di masa mendatang.

Keberhasilan penilaian SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari pimpinan daerah, tim koordinasi SPBE, hingga masyarakat. Dengan terus mengembangkan inovasi dan menjaga komitmen terhadap digitalisasi, Lombok Tengah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi.

2. Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 mendapat penghargaan TASTURA AWARD Kategori TUHU Peringkat ke II



Foto 1: Foto bersama pada saat penerimaan piagam penghargaan Tastura Award Kategori Tuhu Peringkat ke II di arena CFN Lombok Tengah

Dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke-79, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar Tastura Award 2024. Ajang penghargaan ini melibatkan kolaborasi antara Pemkab Lombok Tengah dan wartawan dalam menyeleksi serta menilai penerima penghargaan. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat apresiasi adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah**, yang berhasil meraih penghargaan Tastura Award 2024 dengan predikat "**TUHU**" Peringkat II.

Penghargaan dan Dedikasi

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi Diskominfo dalam menjalankan tugas dengan:

- **Kerajinan:** Diskominfo senantiasa konsisten bekerja keras dalam memberikan pelayanan informasi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
- **Dinamika Kerja:** Selalu tanggap terhadap perubahan dan tantangan dalam teknologi informasi.
- **Keuletan dan Kesungguhan:** Berusaha menjalankan tugas dengan penuh semangat dan pantang menyerah.
- **Komitmen:** Memiliki kemauan kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh **Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, ST., MT.**, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Diskominfo terhadap pembangunan dan pelayanan publik berbasis teknologi.

Analisis dan Dampak Kinerja

Selama tahun 2024, Diskominfo Lombok Tengah telah menunjukkan berbagai pencapaian strategis, di antaranya:

1. **Peningkatan Infrastruktur Digital:** Memperluas cakupan jaringan internet hingga ke desa-desa untuk mendukung program desa pintar.
2. **Inovasi dalam Komunikasi Publik:** Peluncuran aplikasi dan portal informasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi pemerintahan secara transparan.
3. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Melakukan pelatihan rutin bagi ASN untuk meningkatkan pemahaman terkait transformasi digital.
4. **Kolaborasi dengan Media:** Melibatkan wartawan dalam berbagai kegiatan untuk memastikan keterbukaan informasi publik.

Rekomendasi untuk 2025

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Diskominfo Lombok Tengah dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. **Pengembangan Layanan Berbasis AI:** Mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dalam pelayanan publik untuk efisiensi yang lebih tinggi.
2. **Penguatan Literasi Digital Masyarakat:** Mengadakan program edukasi digital untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekosistem digital pemerintah.
3. **Kolaborasi Antar-OPD:** Memperkuat sinergi dengan OPD lain untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lombok Tengah.

Penutup

Penghargaan "**TUHU**" **Peringkat II** yang diraih Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah merupakan bukti nyata dari kerja keras dan komitmen OPD ini dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berbasis teknologi informasi. Ke depan, Diskominfo diharapkan dapat terus berinovasi dan memberikan kontribusi lebih besar untuk mewujudkan Lombok Tengah yang cerdas, transparan, dan maju.

3. Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Memfasilitasi Desa Aik Mual Raih Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024 tingkat Nasional.



Foto 2: Perwakilan Desa Aik Mual dan Pengelola PPID Utama Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Desa tersebut menerima penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024 dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024 yang digelar Komisi Informasi Pusat, di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Penghargaan itu diterima langsung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Aik Mual, Aisyah Ma'ruf Zaini, yang didampingi oleh tim PPID Utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta jajaran pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan Komisi Informasi Pusat.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesguantoro, menegaskan pentingnya dukungan dari para pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi. "Pimpinan badan publik harus betul-betul mendukung keterbukaan informasi publik agar transparansi dan akuntabilitas dapat terus terjaga," ujarnya.

Dalam sambutannya, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan harapan agar penghargaan ini memperkuat semangat demokrasi di Indonesia. "Mudah-mudahan acara ini mempersatukan semangat untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Saya siap

menjadi bagian dalam memperjuangkan keterbukaan informasi yang menjadi salah satu pilar demokrasi," katanya.

Desa Aik Mual dipilih mewakili Nusa Tenggara Barat karena dinilai berhasil mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi secara konsisten. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk terus meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.



Foto 3 : Bersama Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, Najamuddin Amy

**MATRIKS HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOMBOK TENGAH**

NO	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2024	ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2024	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) OPD TAHUN 2024	PROGRAM/ KEGIATAN OPD TAHUN 2024	ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	1 Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	1 Indeks SPBE	2,55	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.629.427.478
					Nilai Domain Kebijakan SPBE	3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.101.084.503
					Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2		
					Nilai Domain Manajemen SPBE	1,6		
					Nilai Domain Layanan SPBE	3,6		
				2 Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	2 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	67.882.698
					Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%		
3 Meningkatkan tata kelola persandian dan keamanan informasi	3 Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	111.865.828				

Praya, 8 September 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



Drs. MUHAMAD

NIP: 196512311989031209

PENJELASAN MATRIKS HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Analisis Dokumen Perencanaan

1. Sasaran RPJMD dan Prioritas RKPD

- **Sasaran RPJMD:** Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- **Prioritas RKPD:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan tata kelola berbasis elektronik.
- **Arah Kebijakan RKPD:** Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung sistem birokrasi dan pelayanan publik yang memuaskan.

2. Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD

- **Tujuan:**
 - Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan publik yang optimal.
 - Meningkatkan pengelolaan data statistik yang akurat dan terintegrasi.
 - Meningkatkan keamanan informasi melalui tata kelola persandian yang baik.
- **Sasaran:**
 - Indeks SPBE mencapai 2,55.
 - Seluruh OPD (100%) menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
 - Tingkat keamanan informasi pemerintah mencapai 100%.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Indeks SPBE dengan nilai target:
 - Domain Kebijakan SPBE: 3.
 - Domain Tata Kelola SPBE: 2.
 - Domain Manajemen SPBE: 1,6.
 - Domain Layanan SPBE: 3,6.
- Persentase OPD yang menggunakan data statistik: 100%.
- Tingkat keamanan informasi pemerintah: 100%.

4. Program dan Anggaran

- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika:**
 - Anggaran: Rp 1.629.427.478,-
- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:**
 - Anggaran: Rp 2.101.084.503,-
- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral:**
 - Anggaran: Rp 67.882.698,-
- **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi:**
 - Anggaran: Rp 111.865.828.

Penjelasan Laporan

1. **Konteks dan Relevansi** Dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 telah dirancang untuk mendukung target RPJMD dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah melalui implementasi SPBE. Fokus utama adalah pelayanan publik berbasis elektronik, pengelolaan data statistik yang efisien, dan penguatan keamanan informasi.

2. Strategi Pelaksanaan

- **SPBE sebagai Fokus Utama:** Dengan target indeks 2,55, Diskominfo memprioritaskan peningkatan tata kelola dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung sistem birokrasi modern.
 - **Data Statistik sebagai Landasan Pembangunan:** Pemanfaatan data statistik oleh seluruh OPD menjadi kunci dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti.
 - **Keamanan Informasi:** Pengelolaan persandian difokuskan untuk mencapai tingkat keamanan informasi pemerintah hingga 100%, melindungi data dari ancaman siber.
3. **Efisiensi Penggunaan Anggaran** Dengan alokasi anggaran sebesar lebih dari Rp 3,5 miliar, program-program Diskominfo dirancang untuk memberikan dampak signifikan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Alokasi terbesar diberikan pada pengelolaan aplikasi informatika dan informasi publik.
4. **Peluang dan Tantangan**
- **Peluang:** Implementasi SPBE yang lebih matang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 - **Tantangan:** Pemenuhan target indeks SPBE memerlukan kolaborasi lintas OPD serta penguatan infrastruktur dan SDM.

Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun program strategis yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan RKPD 2024. Fokus pada SPBE, pengelolaan data, dan keamanan informasi menunjukkan komitmen Diskominfo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Rekomendasi

1. **Penguatan SDM dan Infrastruktur:** Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk aparatur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi.
2. **Monitoring Berkala:** Melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan pencapaian target IKU, khususnya indeks SPBE.
3. **Kolaborasi Antar-OPD:** Meningkatkan sinergi dengan OPD lain untuk optimalisasi program dan efisiensi anggaran.

Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program Diskominfo untuk tahun 2024 dan seterusnya.

Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Muhamad
NIP. 19651231 198903 1 209

